

ABSTRAK

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat. Berkaitan dengan keamanan yang di anggap meresahkan ditengah masyarakat salah satunya ialah aksi pencurian. Secara yuridis melakukan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang dapat di ancam dengan kurungan penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Masalah yang diangkat adalah bagaimanakah kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana pencurian kucing persia di kepolisian sektor telanaipura, apakah yang menjadi kendala dalam kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana pencurian kucing persia di kepolisian sektor telanaipura, bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana pencurian kucing persia di kepolisian sektor telanaipura. Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan model pendekatan penelitian *Empiris*, sedangkan *Socio-Legal Research*. Tehnik penentuan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Penyelesaian tindak pidana pencurian kucing persia telah di selesaikan secara non penal. Mengingat banyak tindak pidana pencurian yang meski hanya berobyek kecil tetapi mendapat hukuman berat. Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya. Terdapat kendala yang di hadapi antara lain (1) adanya dorongan (Intervensi) dari pihak pemilik kucing persia yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara pencurian tersebut ke meja hijau (persidangan), (2) Adanya ganti rugi yang diminta pemilik kucing Persia sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) terhadap pihak keluarga pencuri. Adapun upaya dilakukan antara lain (1) Pihak Kepolisian Sektor Telanaipura mencoba melakukan dialog terhadap pihak keluarga pemilik kucing Persia bahwa pelaku pencurian tersebut merupakan ibu rumah tangga (janda) yang tidak ada penghasilan, (2) dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan, uang permintaan ganti rugi dibayarkan Kapolsek Telanaipura secara pribadi kepada ibu Lina untuk menyerahkan uang yang telah diberikan kepada pihak keluarga pemilik kucing Persia. Saran yang dikemukakan hendaknya pihak pemilik kucing persia tidak meminta syarat mengganti rugi 5 kali lipat harga biaya perawatan dan makanan kucing yang sempat di curinya seharga Rp. 1.800.000,00.- kepada ibu Lina untuk mencabut laporannya, mengingat kondisi ekonomi sulit tersebut di tambah lagi keadaan nya seorang janda yang tidak ada penghasilan tetap hanya dari mengumpulkan barang bekas dan memiliki 2 orang anak pastilah tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

Kata Kunci : Kebijakan Non Penal, Pelaku Tindak Pidana, Pencurian Kucing Persia

ABSTRACT

A criminal act is an act of doing or not doing something that has an element of error as an act that is prohibited and punishable by crime, where the imposition of a crime against the perpetrator is for the sake of maintaining legal order and ensuring security in society. In relation to security, one of the things that is considered disturbing among the community is theft. Juridically, committing theft is a criminal act that can be threatened with imprisonment as regulated in Article 362 of the Criminal Code. The issues raised are what is the non-penal policy for perpetrators of the crime of stealing Persian cats in the Telanaipura police sector, what are the obstacles in the non-penal policy for perpetrators of the crime of stealing Persian cats in the Telanaipura sector police, what are the efforts to overcome the obstacles in the non-penal policy against perpetrators? crime of theft of Persian cats in the Telanaipura police sector. The type of this research is Sociological Juridical. In writing this thesis the author used an Empirical research approach model, while Socio-Legal Research. The material determination technique is carried out using Purposive Sampling. The resolution of the crime of stealing Persian cats has been resolved in a non-penal manner. Considering that there are many crimes of theft which, even though they only involve small objects, receive heavy penalties. Meanwhile, it is not uncommon for serious theft to occur but it results in the release of the perpetrator. There are obstacles faced, including (1) encouragement (intervention) from the Persian cat owner who feels aggrieved to continue the theft case to court (trial), (2) There is compensation requested by the Persian cat owner as a condition for peace (withdraw the report) against the thief's family. The efforts made include (1) the Telanaipura Sector Police trying to hold a dialogue with the family of the owner of the Persian cat that the perpetrator of the theft was a housewife (widow) who had no income, (2) taking into account humanitarian reasons, the money requested for compensation was paid. The Telanaipura Police Chief personally asked Lina's mother to hand over the money that had been given to the family who owned the Persian cat. The suggestion put forward is that the owner of the Persian cat should not ask for compensation of 5 times the price of care and food for the cat which was stolen for Rp. 1,800,000.00.- to Lina's mother to withdraw her report, considering the difficult economic conditions, plus the situation of a widow who does not have a steady income just from collecting used goods and has 2 children, she definitely does not have the ability to pay it.

Keywords: Non-Penal Policy, Criminal Perpetrators, Persian Cat Theft